RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

AKD: RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Bulan: September 2020

Oleh: RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, aparat penegak hukum lainnya, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi pelanggar hukum.

Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan dimaknai tidak hanya mencakup narapidana, tetapi juga meliputi tahanan, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, dan tercapainya reintegrasi sosial.

Sistem Pemasyarakatan inilah yang menjadi dasar bagi institusi Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemasyarakatan merupakan alat negara yang mempunyai peran dalam penegakan hukum untuk memberikan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengentasan anak didik pemasyarakatan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemasyarakatan adalah bagian yang integral dalam sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan fungsi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan, benda sitaan, dan barang rampasan. Pemasyarakatan menjalankan perannya sejak proses *adjudikasi, adjudikasi,* hingga *post-adjudikasi*, yang mana pada setiap tahapan ini, Pemasyarakatan mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur secara jelas dan tegas.

Pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan ditopang oleh lima unit pelaksana teknis, yaitu Rumah Tahanan Negara (Rutan), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA). Dalam hierarkhi organisasi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyaraktan. Hal ini untuk memperjelas pertanggungjawaban kinerja organisasi.

Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan, mengembengkan kapasitas petugas pemasyarakatan merupakan satu hal yang utama. Oleh karena itu, rekruitmen, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan petugas pemasyarakatan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana pada UPT Pemasyarakatan pun menjadi aspek yang diatur dalam undang-undang ini. Sarana dan prasarana ini dikembangkan dengan mengedepankan keberfungsian yang terintegrasi antara aspek ruang gerak, kesehatan, keselamatan, dan keamanan, serta kebutuhan pelaksanaan tugas.

Dalam undang-undang ini diatur pula hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan. Hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak mendapatkan perawatan, hak melanjutkan pendidikan dan pengajaran, dan hak menyampaikan keluhan adalah beberapa hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya adalah mengikuti setiap program yang diselenggarakan, mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku, dan menjaga kebersihan lingkungan.

Memberikan perlakuan terbaik terhadap anak didik pemasyarakatan menjadi salah satu fokus yang dimuat dalam undang-undang. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa anak adalah individu yang membutuhkan perlakuan khusus yang sesuai dengan masa tumbuh kembang mereka. Perlakuan terhadap anak harus didasarkan pada prinsip perlindungan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Untuk menjaga integritas petugas pemasyarakatan, undang-undang ini memuat tentang kode etik petugas pemasyarakatan. Kode etik ini sebagai pedoman bagi petugas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah hal penting dalam mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pembentukan Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan pun sebagai wujud adanya kertebukaan terhadap partisipasi masyarakat.

Adanya pengaturan yang bersifat komprehensif tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharapkan agar pelaksanaan tugas Pemasyarakatan dapat dilakukan secara efektif, efisien, terpadu, terorganisir dengan baik, dan bersifat komprehensif. Selain itu, pengaturan ini juga untuk memperkuat posisi Pemasyarakatan dalam system peradilan pidana. Pemasyarakatan harus mempu menjalankan perannya dalam proses penegakan hukum, sejak pada tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post-adjudikasi.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan perlu diubah dan diganti.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pemasyarakatan Erma Suryani Ranik menerangkan Revisi UU Pemasyarakatan mengubah beberapa substansi yang terdapat dalam UU 12/1995.

Pertama, penguatan posisi lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu *(integrated criminal justice system)*, khususnya yang menyelenggarakan penegakan hukum terkait perlakuan terhadap anak dan warga binaan lain.

Kedua, tujuan pemasyarakatan selain peningkatan kualitas narapidana anak, warga binaan, juga menjamin perlindungan hak terhadap semua tahanan.

Ketiga, pembaharuan terhadap asas pemasyarakatan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.

Keempat, pengaturan tentang fungsi pemasyarakatan. Mulai pelayanan, pembinaan, pembimbing pemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Kelima, penegakan tentang hak dan kewajiban bagi tahanan, anak dan warga binaan. “Melalui pengaturan baru hak para warga binaan bakal lebih diperhatikan, begitu pula tentang kewajiban para warga binaan.”

Keenam, pengaturan tentang penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan pembinaan serta bimbingan kemasyarakatan termasuk pelaksanaan perawatan, pengamanan dan pengamatan bagi warga binaan.

Ketujuh, aturan terkait dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan.

Kedelapan, aturan tentang kode etik dan perilaku pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan perlindungan keamanan. Termasuk pula bantuan hukum bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur di Lembaga Pemasyarakatan.

Kesembilan, aturan soal kewajiban penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Termasuk penyediaan sistem teknologi informasi pemasyarakatan.

Kesepuluh, aturan tentang mekanisme pengawasan fungsi pemasyarakatan.

Kesebelas, pengaturan tentang kerja sama serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Sumber **Kutipan:**
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/64-rancangan-peraturan/rancangan-undang-undang/2296-rancangan-undang-undang-tentar

dan

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d835348e6b85/bakal-disahkan--ini-poin-perubahan-uu-pemasyarakatan

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Hinca Panjaitan Sarankan Reformasi Lembaga Pemasyarakatan	http://www.dpr.go.id/berita/de \ntail/id/30018/t/Hinca+Panjaita \nn+Sarankan+Reformasi+Lembaga+P \nemasyarakatan
Berita	Kelebihan Kapasitas Karena Banyaknya Warga Binaan Narkoba Jadi Penghuni Lapas	http://www.dpr.go.id/berita/de \ntail/id/16556/t/Kelebihan+Kapa \nsitas+Karena+Banyaknya+Warga+B \ninaan+Narkoba+Jadi+Penghuni+La \npas
Berita	Komisi III Dorong Optimalisasi Tugas Lapas Kerobokan	http://www.dpr.go.id/berita/de \ntail/id/19761/t/Komisi+III+Dor \nong+Optimalisasi+Tugas+Lapas+K \nerobokan
Berita	Komisi III Dukung Reformasi Pemasyarakatan di Ditjen PAS	http://www.dpr.go.id/berita/de \ntail/id/28718/t/Komisi+III+Duk \nung+Reformasi+Pemasyarakatan+d \ni+Ditjen+PAS
Berita	Komisi III Kuatkan Peran Pemasyarakatan dengan Revisi UU Pemasyarakatan	http://www.dpr.go.id/berita/de \ntail/id/24945/t/Komisi+III+Kua \ntkan+Peran+Pemasyarakatan+deng \nan+Revisi+UU+Pemasyarakatan
Berita	Komisi III Setujui RUU Permasyarakatan	http://www.dpr.go.id/berita/de \ntail/id/25955/t/Komisi+III+Set \nujui+RUU+Permasyarakatan
Berita	Komisi III Soroti Lemahnya Pengawasan Lapas Kerobokan, Bali	http://www.dpr.go.id/berita/de \ntail/id/16870/t/Komisi+III+Sor \noti+Lemahnya+Pengawasan+Lapas+ \nKerobokan%2C+Bali
Berita	Over Kapasitas Lapas Jadi Perhatian pada RKUHP	http://www.dpr.go.id/berita/de \ntail/id/25120/t/Over+Kapasitas \n+Lapas+Jadi+Perhatian+pada+RKU \nHP
Berita	Pembenahan Sistem Pemasyarakatan Mutlak Dibutuhkan	http://www.dpr.go.id/berita/de \ntail/id/24743/t/Pembenahan+Sis \ntem+Pemasyarakatan+Mutlak+Dibu \ntuhkan
Berita	Pemerintah dan DPR Disarankan Segera Selesaikan RUU Pemasyarakatan	http://www.dpr.go.id/berita/de \ntail/id/28220/t/Pemerintah+dan \n+DPR+Disarankan+Segera+Selesai \nkan+RUU+Pemasyarakatan
Berita	Perampasan HP di Lapas Tidak Boleh Sembarangan	http://www.dpr.go.id/berita/de \ntail/id/16445/t/Perampasan+HP+ \ndi+Lapas+Tidak+Boleh+Sembarang \nan
Berita	Perlu Solusi Konkret atasi Over Capacity Lapas	http://www.dpr.go.id/berita/de \ntail/id/16561/t/Perlu+Solusi+K \nonkret+atasi+Over+Capacity+Lap \nas+
Berita	UU Pemasyarakatan Belum Atur Warga Binaan Anak-Anak	http://www.dpr.go.id/berita/de \ntail/id/25175/t/UU+Pemasyaraka \ntan+Belum+Atur+Warga+Binaan+An \nak-Anak
Jurnal	Coping Strategies of Prison Inmates in Correctional Institutions	https://www.jstor.org/
Jurnal	If You Build It, They Will Fill it: The Consequences of Prison Overcrowding Litigation	https://www.jstor.org/
Jurnal	Implikasi Overcapacity terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia	https://jurnal.fh.unila.ac.id/ \nindex.php/cepalo/article/view/ \n1847/1508
Jurnal	Kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai Sebuah Masalah Sosial	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/info_singkat/Info%20Sin \ngkat-V-14-II-P3DI-Juli-2013-73 \n.pdf?1600054007
Jurnal	Lembaga Pemasyarakatan dan Budaya Hukum Masyarakat	http://journal.univpancasila.a \nc.id/index.php/selisik/article \n/view/1521/935

Jurnal	Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)	https://core.ac.uk/download/pd \nf/268381424.pdf
Jurnal	Older Adult Inmates: The Challenge for Social Work	https://www.jstor.org/
Jurnal	Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia: Dampak dan Solusinya	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/info_singkat/Info%20Sin \ngkat-XI-10-II-P3DI-Mei-2019-22 \n2.pdf?1600053973
Jurnal	Pengembangan Sistem Pemasyarakatan Ke Arah Realisasi Gagasan Open Prison Kajian Prospektif RUU Pemasyarakatan	https://journal.uii.ac.id/IUST \nUM/article/view/5017/4451
Jurnal	Pidana Kerja Sosial dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan	https://journal.uii.ac.id/Lex- \nRenaissance/article/view/14881 \n/pdf
Jurnal	Prison Conditions and Recidivism	https://www.jstor.org/
Jurnal	Prisons, Rules and Courts: a Study in Administrative Law	https://www.jstor.org/
Jurnal	Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu	https://journal.untar.ac.id/in \ndex.php/jmishumsen/article/vie \nw/333/274
Jurnal	Reflections on Institutional Boundary Work and Boundary Crossing: Prison, Free Society, and Prisoner Reentry	https://www.jstor.org/
Jurnal	Regulation of Prison Conditions	https://www.jstor.org/
Jurnal	Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan (Rehabilitation of Prisoners in Overcrowded Correctional Institution)	http://jurnal.dpr.go.id/index. \nphp/hukum/article/view/231
Jurnal	Rehabilitation Strategies for Diverse Inmate Populations: Considerations for Recreational Therapists, Counselors and Educators	https://www.jstor.org/
Jurnal	Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan	https://core.ac.uk/download/pd \nf/327184893.pdf
Jurnal	“Kemewahan” Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/info_singkat/Info%20Sin \ngkat-III-22-II-P3DI-November-2 \n011-23.pdf?1600054076
Buku	Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=310 \n84&keywords=narapidana
Buku	Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemindanaan Di Indonesia	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=201 \n78&keywords=penjara
Buku	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan (Masukan untuk RUU Sistem Pemasyarakatan)	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=553 \n1&keywords=lembaga+pemasyaraka \ntan
Buku	Pertemuan Ilmiah tentang Pola Pembinaan, Penerimaan Bekas Narapidana dan Pemberian Santunan terhadap Korban Tindak Pidana	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=534 \n5&keywords=narapidana
Buku	Privatisasi Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=326 \n45&keywords=lembaga+pemasyarak \natan
Buku	Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=278 \n60&keywords=lembaga+pemasyarak \natan
Buku	Sistem Baru Pembinaan Narapidana	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=169 \n28&keywords=narapidana

Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Telah Beberapa Kali Diubah dan Ditambah	http://www.dpr.go.id/jdih/inde \nx/id/814 http://www.dpr.go. \nid/jdih/index/id/1313
Undang-undang & Peraturan	Draft RUU Pemasyarakatan (UU No 12 Tahun 1995)	http://berkas.dpr.go.id/armus/ \nfile/Lampiran/leg_1-20190813-0 \n41523-5238.pdf
Undang-undang & Peraturan	Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PK.02.01 /1991 tentang Petunjuk Pemindahan Narapidana Anak Didik dan Tahanan	https://icjrid.files.wordpress \n.com/2009/02/kepmen-th-1991-te \nntang-petunjuk-pemindahan-nara \npidana-anak-dan-tahanan.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6/2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara	https://peraturan.bpk.go.id/ho \nme/details/135904/permenkumham \n-no-6-tahun-2013
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah No. 31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	http://bphn.go.id/data/documen \nts/99pp031.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah No. 99/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	https://m.hukumonline.com/pusa \ntdata/detail/lt50fe3a8d5121f/n \nprt/lt4f2a52f2ccd04/pp-no-99-t \nahun-2012-perubahan-kedua-atas \n-peraturan-pemerintah-nomor-32 \n-tahun-1999-tentang-syarat-dan \n-tata-cara-pelaksanaan-hak-war \nga-binaan-pemasyarakatan
Undang-undang & Peraturan	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (1), dan Pasal 20 Ayat (1)	http://www.dpr.go.id/jdih/uu19 \n45
Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	http://www.dpr.go.id/jdih/inde \nx/id/795
Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	http://www.dpr.go.id/dokjdih/d \nocument/uu/504.pdf
Surat kabar	Atasi Over Kapasitas Lapas: Dirjen PAS, Bikin Terobosan Dong!	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/36321
Surat kabar	Darurat Lapas Disuarakan DPR: Napi Tidur Berhimpitan	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/37908
Surat kabar	DPR Minta Fasilitas Kesehatan Lapas Diperbaiki	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/28579
Surat kabar	Jual Beli Fasilitas Mewah di Lapas, Sistemik	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/34495
Surat kabar	Kembalikan Hak Napi	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/22799
Surat kabar	Legislasi Bahas Ulang Pasal Bermasalah di RKUHP dan RUU Pemasyarakatan	https://epaper.dpr.go.id/index \n/detail/id/12401
Surat kabar	Lembaga Pemasyarakatan : Perlu Pembenahan Manajemen	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/7322
Surat kabar	Penjara Over Kapasitas, DPR : Tingkatkan Keterampilan Napi	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/39005
Surat kabar	Penolakan Makin Luas	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/39014
Surat kabar	Polemik Status Nazaruddin Picu Pembahasan RUU Pemasyarakatan	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/39394
Surat kabar	Sistem Lapas Harus Dievaluasi	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/28574